

# **Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan**

## **Development of Islamic Economy Based on Population in Rural Areas**

Dudi Badruzaman

Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, Indonesia

E-Mail: [badruzaman.dudi@yahoo.com](mailto:badruzaman.dudi@yahoo.com)

Naskah masuk: 2018-11-01

Naskah diperbaiki: 2019-03-01

Naskah diterima: 2019-05-01

---

### **Abstrak**

Nowadays, Islamic economy is growing and developing considerably in Indonesia. It is considered as a better alternative of the earlier economic systems which are traditional (communal) and capitalist economy. These two economic systems did not quite give way to get a prosperous life for Indonesian people. The existing Islamic economics hopefully might answer this problem. So, organizing Islamic economic system as a discourse and praxis must be developed in the community's life. The growth and development of Islamic economic institutions were initially an urban phenomenon. However, lately it has been gone through rural areas. The efforts to develop the role and contribution of Islamic economic institutions in rural areas, can take advantage of the conditions of rural population. Understanding the composition of the population might help to establish economic institutions, to distribute funds and to develop various forms of business.

**Keywords:** Islamic Economics, Institutions, Population, and Rural

### **Abstrak**

Ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebagai alternatif dari sistem ekonomi yang terlebih dahulu ada yaitu ekonomi tradisional (komunal) dan kapitalis. Kedua sistem ekonomi yang ada tidak cukup mampu memberikan jalan menuju kehidupan sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Hadirnya ekonomi Islam, tentu harus mampu menjawab persoalan tersebut. Pelembagaan dan pengorganisasian sistem ekonomi Islam baik sebagai wacana dan praksis harus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi Islam, pada awalnya merupakan fenomena perkotaan. Namun akhir-akhir ini telah merambah pedesaan. Upaya pengembangan peran dan kontribusi lembaga ekonomi Islam di pedesaan, bisa memanfaatkan kondisi

kependudukan di perdesaan. Pemahaman komposisi penduduk akan membantu dalam mendirikan lembaga ekonomi, mendistribusikan dana dan mengembangkan berbagai bentuk usaha.

**Keywords:** Islamic Economics, Institutions, Population, and Rural

Copyright © 2019 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. All rights reserved.

---

## A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini sistem ekonomi Islam dalam wacana dan praktik telah berkembang luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai wacana ia telah menjadi bagian dari pemberitaan dalam berbagai media, bahan diskusi, seminar, loka karya dan perundang-undangan. Sistem ekonomi Islam tumbuh secara dualistik; berorientasi profit dan non profit. Ekonomi Islam yang berorientasi profit berupa lembaga keuangan syari'ah, dalam bentuk perbankan syari'ah, unit usaha syari'ah, lembaga pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dan lain – lain. Ekonomi Islam non profit berupa; baitul mal, badan amal zakat infaq dan sadaqah (BAZIS), lembaga amal zakat infaq dan sadaqah (LAZIS), dan lembaga wakaf.

Pakar ekonomi memperkirakan ekonomi Islam di Indonesia akan mengalami perkembangan pesat 15 tahun ke depan dan akan menjadi ekonomi syariah terbesar di dunia. Hal tersebut mengingat potensi pasar yang sangat besar, ditambah lagi sektor riil yang terkait ekonomi Islam dapat berjalan lebih baik. Namun demikian market share ekonomi Islam baru sekitar dua persen pasar ekonomi konvensional di perbankan, asuransi dan pasar modal.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dan dunia, terutama sektor ekonomi berorientasi profit, dipengaruhi sejarah pertumbuhan bank syariah. Ia muncul pertama kali di Mesir, tidak menggunakan label Islam, untuk mengantisipasi kecurigaan sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya membentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr tahun 1963. Hingga tahun 1967, sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, tetapi dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.<sup>2</sup> Pengalaman di Mesir menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia tahun 1980-an, dengan wacana mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Di Indonesia sejak Desember 2005, telah beroperasi 3 Bank Umum Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional, yang menyebar ke

---

<sup>1</sup> [ebookbrowse.com/is/islam-sebagai-sistem-ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi sistem ekonomiislam vs lembaga ekonomi sistem pasar](http://ebookbrowse.com/is/islam-sebagai-sistem-ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi sistem ekonomiislam vs lembaga ekonomi sistem pasar)

berbagai wilayah. Data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Desember 2005, menyebutkan total asset dari seluruh bank syariah nasional (belum termasuk BPRS) baru Rp. 20,9 triliun atau 1,42 persen dari seluruh total aset perbankan nasional, dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar Rp.15,6 triliun atau kira-kira 1,38 persen dari dana pihak ketiga yang dihimpun seluruh sistem perbankan.

Sistem ekonomi Islam non profit pun berkembang pesat di Indonesia. Sistem ini mengelola; zakat, sadaqah, infak, dan wakaf. Potensinya sangat besar, jika terkoordinasi dengan baik, menurut riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau kurang lebih Rp 217 triliun. Khusus potensi zakat dari Giro Wadiah dan Deposito Mudharabah di perbankan syariah, ditemukan bahwa potensi zakat keduanya mencapai masing-masing sebesar Rp 155 miliar dan Rp 739 miliar.<sup>2</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi Islam bukan hanya sebagai fenomena perkotaan, tetapi juga perdesaan. Bahkan sistem ekonomi Islam non profit ini sesungguhnya, telah lama berkembang di perdesaan, terutama yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Berkembangnya sistem ekonomi Islam di perdesaan berproses secara evolutif, dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Dinamika sistem ekonomi Islam di perdesaan baik sebagai wacana maupun praksis, menarik penulis untuk menyusun makalah ini.. Analisis kependudukan menjadi pisau untuk menjelaskan potensi pengembangan ekonomi Islam di perdesaan. Kajian atas tema ini bisa menjadi isu menarik dalam rangka pengembangan ilmu pengembangan masyarakat Islam. Baik dalam ranah teoretik maupun praktis. Hal ini selaras dengan upaya pengetahuan tentang pengembangan masyarakat Islam yang selama ini masih terus mencari alternatif. Apalagi fakta yang ada dari ilmu pengembangan masyarakat Islam memiliki dimensi yang luas, sehingga mengembangkan multi dimensi yang berifat abstrak maupun praktis perlu dilakukan.

## **B. Dinamika Sistem Ekonomi di Perdesaan Indonesia**

Pengembangan ekonomi Islam di pedesaan tentu buka sesuatu yang baru bagi mayoritas desa yang penduduknya beragama Islam. Nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi. Namun demikian seringkali masyarakat pedesaan kurang menyadari bahwa mereka telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam. Dalam konteks kekinian yang merupakan evolusi yang panjang kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan merupakan sistem ekonomi campuran yang dualistik.

Sistem ekonomi pedesaan di Indonesia dalam konteks kekinian berlangsung dalam pergumulan sistem ekonomi tradisional (prakapi-talistik)

---

<sup>2</sup> Lihat dalam <http://www.baznas.or.id/ib-peduli/> unduh, Rabu, 26 Juni 2013, jam 16.08.

dengan ekonomi modern (kapitalistik). Sistem ekonomi kapitalistik di perdesaan merupakan bentuk penetrasi perkotaan atas perdesaan. Mentalitas ekonomi kota telah menjungkirbalikan prinsip – prinsip ekonomi produksi masyarakat perdesaan. Selama ini proses produksi ekonomi perdesaan dilakukan untuk swasembada, dengan sedikit kelebihan yang dijual ke pasar. Mentalitas kota telah merubahnya menjadi hukum pertukaran sebagai dasar proses produksi. Petani tumbuh menjadi wiraswasta, memproduksi untuk usaha-usaha perdagangan.<sup>3</sup>

Kapitalisme kota mengikis karakteristik utama masyarakat perdesaan yang sebelumnya bersifat homogen. Kehidupan masyarakat desa yang selama ini, didasari oleh nilai kesederhanaan dan kebersamaan. Semangat kolektivitas dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung secara kontinyu, harmoni sosial cenderung lebih mudah tercipta. Persoalan pangan dan deferensiasi sosial akibat tekanan pertumbuhan penduduk, diselesaikan dengan ekspansi statis oleh komunitas sehingga homogenitas akan tetap terjaga (Boeke, 1974). Perumahan dan pertanian baru akan dibuka dalam jumlah yang secukupnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan subsistensi, ketika komunitas baru telah penuh populasinya maka pola yang sama akan dilakukan.<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi informasi meretas batas – batas isolasi sosial budaya, ekonomi, dan politik perdesaan. Desa menjadi bagian dari kesatuan global. Kualitas kehidupan desa yang terus meningkat baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), pendidikan dan kesehatan telah meningkatkan pula jumlah penduduk perdesaan. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk desa pun tinggi. Lahan – lahan pertanian berubah fungsi menjadi tempat tinggal atau ruang ekonomi dan sosial non pertanian. Perubahan fungsi tersebut menjadikan lahan pertanian semakin sempit. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat mengembangkan teknologi dan komersialisasi pertanian. Transformasi tersebut berdampak sosial dan ekologi sangat luas. Secara sosiologis telah menyebabkan deferensiasi sosial baru di perdesaan.<sup>5</sup>

Ekonomi kapitalistik perkotaan di desa menurut Boeke, belum sepenuhnya menguasai kehidupan perdesaan. Masyarakat desa pada beberapa situasi tertentu masih menjalankan sistem ekonomi dan sosial lama dalam kehidupannya. Perang sistem tersebut masih terus berlangsung. Situasi tersebut diistilahkan Boeke sebagai sistem perekonomian dualistik. akibatnya keselarasan sosial dan kesatuan ekonomi tidak ada. Kedamaian internal yang sejati, hilang

---

<sup>3</sup> Lihat dalam J.H. Boeke, *Pra Kapitalisme di Asia*, terjemahan D. Projosiswoyo (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 9 – 10.

<sup>4</sup> Darmawan Salman, *Sosiologi Desa : Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas* (Makasar : Innawa, 2012), hlm. 52.

<sup>5</sup> Yusup Napiri Maguantara, *Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan : Strategi dan Pratik Menuju Kedaulatan Petani*, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 10 No. 1 Juni 2005, Penerbit Akatiga Bandung, hlm. 36.

dalam kehidupan desa. Keseimbangan ekonomi terguncang dan tanpa dapat dihentikan.

Kemajuan teknologi informasi meretas batas – batas isolasi sosial budaya, ekonomi, dan politik perdesaan. Desa menjadi bagian dari kesatuan global. Kualitas kehidupan desa yang terus meningkat baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang dan papan), pendidikan dan kesehatan telah meningkatkan pula jumlah penduduk perdesaan. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk desa pun tinggi. Lahan – lahan pertanian berubah fungsi menjadi tempat tinggal atau ruang ekonomi dan sosial non pertanian. Perubahan fungsi tersebut menjadikan lahan pertanian semakin sempit. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat mengembangkan teknologi dan komersialisasi pertanian. Transformasi tersebut berdampak sosial dan ekologi sangat luas. Secara sosiologis telah menyebabkan deferensiasi sosial baru di perdesaan.<sup>6</sup>

Faktor yang dominan mempengaruhi perubahan di pedesaan menurut Popkin<sup>11</sup> (1989) adalah politik dan ekonomi. Dominasi kehidupan politik, sangat terlihat dalam banyaknya kepentingan politik atas desa. Diantaranya perkembangan pemerintahan-pemerintahan yang terpusat yang kuat dan ekspansi pasar nasional dan internasional yang disertai dengan perubahan-perubahan mendasar bentuk-bentuk desa dan hubungan petani dengan elit-elit agraria. Sebagian besar petani saat ini hidup dengan bentuk-bentuk desa yang terbuka, yang bercirikan tanggung jawab individual dalam perpajakan, batas-batas desa yang tidak jelas dengan dunia luarnya, sedikit atau tanpa pembatasan-pembatasan dalam pemilikan tanah.

Dalam konteks ini, muncul suatu perkembangan dalam hal ketidakjelasan pengertian-pengertian tentang kewargadesaan (*village citizenship*), dan pemilikan tanah secara pribadi. Faktor dominan dalam aspek perekonomian, terlihat pada relasi petani (penggarap) dengan orang yang memberikan tanah (elit-elit agraria) cenderung berubah bentuk menjadi kontraktual yang tepat dan jelas (dahulu *patron-klien*) untuk mendapatkan barang-barang dan jasa dari beberapa orang yang berbeda. Perubahan relasi ekonomi ini, sebagai akibat dari adanya ekspos petani secara langsung dengan kekuatan-kekuatan pasar. Dampak yang lebih luas akan membahayakan kesejahteraan petani. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan masa lalu. Hubungan ekonomi di masa lalu senantiasa memperhitungkan aspek moral dalam tata kelola ekonomi, sehingga kehidupan petani lebih sejahtera. Pola ini diatur oleh lembaga-lembaga desa. Kondisi di masa lalu tersebut, bisa berlangsung karena semangat kolektivitas masing tinggi.

Wacana dan praksis ekonomi Islam memasuki kehidupan masyarakat perdesaan dalam pergulatan sistem ekonomi lama (tradisional komunal) dengan sistem ekonomi baru (*modern individual liberal*). Perkembangan dan

---

<sup>6</sup> Maguantara, Yusup Napiri, *Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan : Strategi dan Pratik Menuju Kedaulatan Petani*, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 10 No. 1 Juni 2005, Penerbit Akatiga Bandung, hlm. 36.

pertumbuhan sistem ekonomi Islam di pedesaan di Indonesia (khususnya Jawa) sangat signifikan khususnya di pedesaan padi sawah. Kecenderungan ini merupakan sesuatu yang wajar, karena desa dengan sistem pertanian padi sawah selalu mudah menerima perubahan. Apalagi secara sosioreligius masyarakat pedesaan di Jawa mayoritas menganut agama Islam. Secara normatif dan ideologis tentunya mereka akan mudah menerima sistem ini, karena sesuai basis moral atau keyakinan agamanya. Bahkan wacana dan praksis telah dipraktekan sebagai bagian menerapkan syari'at Islam.

### **C. Prinsip – Prinsip dan Perkembangan Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di pedesaan, diantara sistem ekonomi kapitalis (perkotaan) yang dominan dan pra kapitalis bagian dari masa lalu desa. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang merujuk pada syari'at sebagai nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT, yang diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan para pengamalnya baik muslim maupun non muslim. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka sistem ekonomi Islam bersifat universal bagi semua umat manusia, tidak pandang Islam atau non Islam.<sup>7</sup>

Sebagai pengetahuan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai Islam (Al Qur'an dan As Sunah) dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah (kemuliaan, kesejahteraan).

Dalam pandangan Didin S. Damanhuri (2013) falah menunjuk pada kondisi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan umum, baik secara material maupun spiritual, dan terciptanya kemakmuran serta keadilan sosial. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka harus ada keadilan ekonomi baik makro maupun mikro sebagai basis sederhana (felt needs). Terlembagakannya keuangan syariah yang progresif, sebagai bentuk dekonstruksi sistem bubble economy, erztatz/crony capitalism. Pengembangan sistem extended family sebagai basis pengembangan model negara kesejahteraan yang mementingkan peran nilai dan materi secara seimbang. Kemudian mewujudkan negara dengan berlandaskan

---

<sup>7</sup> Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.74. Definisi tersebut menunjukkan realitas yang bersifat normatif (wacana), untuk itu perlu upaya mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah praksis. Dalam praktiknya tentu ekonomi Islam belum tentu sepenuhnya berhasil, walaupun secara prinsipil bagus. Kegagalan dalam praksis, merupakan akibat dari kegagalannya dalam memecahkan berbagai masalah ekonomi masyarakat. Bukan karena kelemahan atau kekurangan dari prinsip-prinsipnya melainkan karena kegagalan para ekonom dalam mentafsir dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Lihat dalam Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 18.

pada tauhid, adalah, dan kholifatul fil ardh. Prinsip-prinsip tersebut berlaku pula dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik (hayatan thoyyiban).<sup>8</sup>

Falah sebagai dasar dan tujuan dari praktik ekonomi Islam berlangsung dalam konteks kehidupan dunia dan akherat. Dalam rangka kepentingan dunia, mencakup aspek kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, dan kekuatan serta kehormatan. Untuk kepentingan akherat mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, dan kemuliaan abadi. Selain itu konsep falah mencakup pula unsur-unsur yang bersifat mikro dan makro, sehingga cakupannya menjadi lebih luas.<sup>9</sup>

Konsep ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan konsep kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil. Instrumennya berupa; zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.<sup>10</sup>

Dalam ekonomi Islam, nilai-nilainya bersumber Alquran dan hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, maka Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Mendasarkan nilai-nilai tersebut, kegiatan ekonomi Islam berlangsung. Fondasi utama Ekonomi Islam yaitu tauhid (aqidah), syariah dan akhlak.

Titik tolak gerakan ekonomi Islam khususnya lembaga keuangan di Indonesia dimulai tahun 1980-an, ditandai adanya upaya untuk membangun proyek ekonomi Islam (termasuk "bank syariah" dan pelarangan bunga). Dalam perkembangan awal tersebut, ada perbedaan pandangan antar Ulama Islam dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Titik temu antar Ulama Islam tersebut baru didapat pada tahun 1990-an. Beberapa Ulama Islam yang berada di dalam organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyepakati untuk mendukung pembentukan bank syariah pertama di Indonesia.

Dukungan tersebut memiliki pengaruh yang strategis dalam gerakan ekonomi Islam. Bahkan dampak dari dukungan MUI, menjadikannya memiliki peran yang semakin kuat dalam menentukan pertumbuhan industri ekonomi

---

<sup>8</sup> Lihat dalam Didin S. Damanhuri, *Globalisasi, Sistem Ekonomi dan Model Pembangunan yang Ber"Keadilan Sosial"* (Revitalisasi Maqasid Syariah di Tengah-Tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional), di Dunia dan di Indonesia, makalah, IE FEM IPB, September 2013.

<sup>9</sup> Munrokhim Minsanam, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

<sup>10</sup> Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam*, makalah tanpa tahun dan penerbit.

Islam setelah tahun 1998.<sup>11</sup> Pada masa ini terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem politik di Indonesia akibat reformasi atas pemerintahan Orde Baru akibat krisis ekonomi. Ruang kebebasan menjadi terbuka lebar, sehingga perkembangan ekonomi Islam semakin terbuka.

Apalagi dalam krisis tersebut lembaga keuangan Islam berhasil keluar dari krisis. Kebijakan dan regulasi sangat penting dan strategis bagi perkembangan kelembagaan ekonomi Islam khususnya pada pengelolaan keuangan. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991 menjadi tonggak sejarah perbankan Islam di Indonesia. Dasar hukum dari keberadaan BMI adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>12</sup>

Kebijakan dan regulasi terus berkembang, diantaranya berupa fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) meliputi: Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Beberapa fatwa DSN-MUI tersebut menjadi dasar penyusunan materi dari berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang juga evolutif. Misalnya PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian dicabut dengan mengeluarkan PBI baru No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

#### **D. Analisa Kependudukan untuk Pengembangan Ekonomi Islam di Perdesaan**

Wacana dan praktik dari sistem ekonomi Islam tidak bisa melupakan diri dari aspek kependudukan. Kondisi kependudukan menurut pakar dan praktisi ekonomi Islam merupakan salah indikator untuk memproyeksikan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Berdasarkan data kependudukan hasil sensus tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia 87% beragama Islam. Jumlah penduduk tersebut merupakan potensi pasar yang besar. Namun perkembangan terkini, terlihat bahwa capaian perbankan syariah baru sekitar 2,3 persen dalam menggarap potensi pasar tersebut. Analisa kependudukan untuk pengembangan ekonomi Islam tidak semata-mata mengacu pada jumlah

---

<sup>11</sup> Choiruzzad, Shofwan Al Banna dan Bhakti Eko Nugroho, Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars, Available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com) Procedia Environmental Sciences 17 ( 2013 ) p. 957.

<sup>12</sup> Dalam Anshori, Abdul Ghofur, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, La Riba : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 2, Desember 2008, hlm.161.

kumulatif penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia. Jumlah penduduk beragama Islam umur produktif bisa menjadi instrumen lain.

Penduduk pada usia ini menentukan dinamika ekonomi masyarakatnya. Jumlahnya yang besar merupakan potensi pasar yang menentukan pengembangan sistem ekonomi Islam. Potensi pasar ekonomi Islam di perdesaan bisa dijelaskan mengacu pada jumlah penduduk penganut agama Islam usia produktif. Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk muslim perdesaan usia produktif (15 – 64 tahun ) sebanyak ; 66.241.249 jiwa atau 64,45 % dari total penduduk perdesaan beragama Islam. Penduduk usia produktif sangat menentukan dinamika ekonomi masyarakat, karena perannya dalam produksi dan distribusi pendapatannya.

### **E. Simpulan**

Hadirnya sistem ekonomi Islam di perdesaan akan mampu menjadi alternatif dalam memperbaiki kehidupan masyarakat perdesaan yang mayoritas berada dalam jerat kemiskinan. Kemampuan tersebut mengacu pada prinsip dan praktik ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan kebutuhan individual dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan (falah). Upaya ini sangat relevan dengan watak usaha ekonomi perdesaan yang lebih bersifat usaha kecil, mikro dan menengah. Sedangkan ekonomi Islam lebih perhatian pada jenis usaha tersebut. Pengembangan sistem ekonomi Islam di perdesaan Indonesia diproyeksikan memiliki prospek yang cerah. Analisis kependudukan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam pada tingkat nasional yaitu 87 %. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk penganut agama Islam yang tinggal di perdesaan yaitu; 66.241.249 jiwa atau 64,45 %. Merujuk pada jumlah tersebut maka dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi perdesaan dengan pendekatan sisten ekonomi Islam. Namun potensi tersebut belum semuanya tergarap secara optimal. Faktor pemahaman menjadi persoalan utama. Untuk itu perlu sosialisasi terus menerus, dengan memanfaatkan berbagai instrumen keislaman, dan media massa dalam berbagai bentuk. Juga pembuktian kapasitas sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas dan kesejahteraan ekonomi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianto, *Filsafat Ekonomi Islam*, makalah tanpa tahun dan penerbit.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*, La Riba : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Boeke, J.H., *Pra Kapitalisme di Asia, terjemahan D. Projosiswoyo* (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983).
- Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar, terjemahan Suherman Rosyidi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012).

Choiruzzad, Shofwan Al Banna dan Bhakti Eko Nugroho, *Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars*, Available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com) Procedia Environmental Sciences 17 ( 2013 ) 957 – 966

Chong, Beng Soon dan *Ming-Hua Liu*, *Islamic banking: Interest-free or interest-based?*, Available online at [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com) Pacific-Basin Finance Journal 17 (2009) 125–144.

Damanhuri, Didin S., *Globalisasi, Sistem Ekonomi dan Model Pembangunan yang Ber"Keadilan Sosial" (Revitalisasi Maqasid Syariah di Tengah-Tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional)*, di *Dunia dan di Indonesia*, makalah, IE FEM IPB, September 2013

. Hayami ,Yujiro dan Masao Kikuchi, *Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*, terjemahan Zahara D. Noer, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987)..

Lembaga-Lembaga Ekonomi Sistem Ekonomi Islam Vs Lembaga Ekonomi Sistem Pasar, lihat dalam [ebookbrowse.com/is/islam-sebagai-sistem-ekonomi](http://ebookbrowse.com/is/islam-sebagai-sistem-ekonomi), unduh Senin, 24 Desember 2012.

Maguantara,Yusup Napiri, *Pembenahan Tata Produksi Pertanian Pangan : Strategi dan Pratik Menuju Kedaulatan Petani*, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 10 No. 1 Juni 2005, Penerbit Akatiga Bandung.

Munrokhim Minsanam, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).

Popkin, Samuel S., *Petani Rasional*, (Jakarta: Yayasan Padamu Negeri, 1986).

Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Raharjo, M. Dawam, *Menuju Perbankan Sosial Islam Transformatif*, Makalah, Jakarta, Agustus, 2013.

Salman, Darmawan, *Sosiologi Desa : Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas* (Makasar : Inninawa, 2012).